

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disabilitas merupakan sebuah kondisi berkurangnya fungsi organ tubuh yang dialami oleh sebagian manusia di dunia. Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia¹, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Faktor disabilitas pada dasarnya dialami oleh seseorang karena kecelakaan atau bawaan dari lahir, dengan kondisi tersebut mereka akan mengalami berbagai risiko sosial, ekonomi, keterbatasan akses akan informasi, akses lapangan pekerjaan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya.

Disabilitas merupakan suatu masalah keterbelakangan mental atau perbedaan fisik yang membuat tumbuh kembang mereka lebih lambat daripada manusia pada umumnya, kesulitan dalam berinteraksi dan memahami apa yang diberikan oleh orang lain merupakan salah satu ciri dari disabilitas mental/intelektual. Disabilitas dapat dibagi menjadi tiga kategorisasi, yaitu disabilitas intelektual, disabilitas fisik dan disabilitas ganda. Disabilitas intelektual dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu intelektual tinggi (orang dengan kemampuan bakat diatas rata rata), intelektual rendah yang dikelompokan menjadi dua berdasarkan iq (iq 70-90 disebut sebagai *slow learner/lambat belajar*) dan (iq <70 disebut sebagai anak berkebutuhan khusus), contoh dari disabilitas intelektual adalah, down syndrome, tunagrahita, dll. Disabilitas fisik atau seseorang dengan kelainan fisik yang berbeda sejak lahir atau karena kecelakaan, contoh dari disabilitas ini adalah tuna rungu, tuna daksia, tuna wicara, dan

¹Tratama Helmi supanji, 2023, Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025

tuna netra. Disabilitas yang ketiga adalah disabilitas ganda, disabilitas ini merupakan kondisi yang dialami seseorang apabila memiliki kelainan mental dan kelainan fisik seperti tunagrahita yang mengalami tuna daksa sekaligus.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pemerintah juga telah menerbitkan tujuh PP atau Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas, permasalahan tersebut cenderung membuat penderitanya mengalami pengucilan dan keterasingan yang dilakukan oleh masyarakat bahkan keluarga karena kelompok penyandang disabilitas tersebut memiliki kekurangan dalam segi fisik maupun kecerdasan emosional. Ketimpangan yang dialami oleh penyandang disabilitas tersebut merupakan masalah struktural yang dapat diatasi dengan adanya sistem pemberdayaan dan pemberian ruang berkembang untuk mereka.

Data BPS 2024 mencatat lebih dari 17,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan sepertiganya belum menamatkan pendidikan dasar, partisipasi kerja hanya 23,94 persen, serta tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Fakta ini diperparah oleh rendahnya kesadaran publik, keterbatasan akses komunikasi, dan fasilitas fisik maupun digital yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.² Data penyandang disabilitas di Indonesia sejalan dengan gambaran yang ada di kawasan Asia, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling beresiko mengalami kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses. Laporan-laporan dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa di banyak negara Asia,

² Novrizaldi, 2024, Perjuangan Inklusi Ibarat Lari Marathon, Kemenko PMK Dorong Satu Data Disabilitas Nasional,<https://www.kemenkopmk.go.id/perjuangan-inklusi-ibarat-lari-marathon-kemenko-pmk-dorong-satu-data-disabilitas-nasional>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025

penyandang disabilitas secara sistematis menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, serta ruang partisipasi sosial akibat rendahnya tingkat inklusivitas kebijakan publik. Dengan demikian, persoalan disabilitas tidak dapat dipahami sebagai isu individual, melainkan sebagai masalah ketidakadilan sosial dan kegagalan sistem pembangunan dalam menghadirkan tata kelola yang inklusif.

Agenda global tentang inklusi disabilitas mencakup Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, yang di dalamnya termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Di kawasan Asia Tenggara, agenda inklusi disabilitas dirumuskan dalam *Incheon Strategy for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific* 2013–2022, serta dalam dokumen ASEAN *Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities*.³ Hal ini dapat diketahui bahwa terdapat isu global pada disabilitas yang mendorong pergerakan positif dalam penyediaan fasilitas publik yang lebih inklusif. Hasilnya bisa dilihat dari ada nya tempat duduk prioritas pada transportasi umum, jalur landai pada jembatan penyebrangan orang (JPO), *guiding block* pada trotoar, akses pada lift dan toilet yang ramah disabilitas. Perubahan yang ada pada infrastruktur ini menunjukan adanya kesadaran institusional dalam melihat aksesibilitas sebagai pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dignityku melalui pelatihan *cooking class* merupakan jawaban dari isu global yang mulai melihat bahwa disabilitas harus memiliki ruang partisipatif di lingkungan masyarakat, pemenuhan hak dasar disabilitas seperti pendidikan formal, informal dan akses kedalam fasilitas publik merupakan hasil dari refleksi diskursus global yang melihat bahwa disabilitas merupakan individu yang harus mendapatkan hak dasar sebagai manusia dan warga

³ Deborah Rhodes, dkk, 2025, Cultural understandings of inclusion in Southeast Asia, *International Journal of Developmental Disabilities*, 12(6), Hlm. 798.

negara. Hambatan utama penyandang disabilitas bukan terletak pada kondisi individual, melainkan pada struktur, lingkungan, dan sistem sosial yang belum sepenuhnya aksesibel.

Strategi merupakan rencana yang disusun untuk dapat mencapai tujuan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, dalam hal ini komunitas penyandang disabilitas melakukan proses pemberdayaan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan dan menghindari ketimpangan. Keterbatasan akan kemampuan fisik dan intelektual membuat penyandang disabilitas harus mendapat bimbingan dan perhatian yang lebih intens untuk merangsang tumbuh kembang serta pemikiran mereka. Penanaman sifat tidak percaya diri atau sifat meremehkan diri sendiri merupakan salah satu faktor penting yang harus dihilangkan oleh penderita disabilitas, penyandang disabilitas harus memiliki daya juang tinggi untuk dapat bisa berdiri sendiri atau mandiri agar bisa bertahan hidup dan memperbaiki kehidupan.

Perjuangan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas merupakan salah satu upaya perjuangan yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, misalnya kebijakan pemerintah, bantuan swasta dan bantuan masyarakat. Kondisi rentan yang dialami oleh penyandang disabilitas membuat berdirinya komunitas Dignityku untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan agar dapat mandiri. Meningkatkan pendidikan, pekerjaan, maupun perekonomian, permasalahan yang dialami penyandang disabilitas merupakan tantangan yang mungkin tidak akan ada habisnya, oleh karena itu Dignityku selaku kafe yang memiliki perhatian lebih terhadap para penyandang disabilitas memberikan pelayanan khusus berupa program kelas memasak yang diikuti oleh para peserta penyandang disabilitas.

Dignityku merupakan kafe yang bergerak di industri F&B atau Food and Beverages yang memiliki konsep untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki

disabilitas, program tersebut membantu penyandang disabilitas untuk belajar memasak, menyajikan makanan, bahkan menjadi barista dalam beberapa kesempatan.⁴ Dalam menjalankan program pemberdayaan/pelatihan untuk penyandang disabilitas, Dignityku membuka kesempatan bagi instansi maupun kelompok swasta untuk bekerjasama mewujudkan masa depan baru bagi penyandang disabilitas dalam menciptakan dan mengembangkan strategi yang akan membantu penyandang disabilitas dalam menyusun strategi-strategi kebertahanan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Subjek penelitian yang akan diteliti yaitu para penyandang disabilitas di kafe Dignityku Pasar Minggu Jakarta Selatan. Permasalahan utama dari penyandang disabilitas adalah kurangnya tempat di masyarakat karena keterbatasan fisik dan mental yang dimilikinya. Hal ini tentunya menimbulkan tantangan bagi penyandang disabilitas untuk bertahan dari kerasnya kehidupan. Terjadinya peningkatan standar untuk bekerja seperti *good looking* juga menjadi masalah bagi para penyandang disabilitas yang ada di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas ini akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan dan hilangnya harapan untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Selain itu akan terjadi diskriminasi sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas karena keterbatasan dan ekspektasi tinggi di masyarakat, oleh karena itu diperlukan strategi bagi para penyandang disabilitas untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan menggunakan strategi bertahan. Kerentanan yang dialami penyandang disabilitas seperti disfungsi organ merupakan salah satu faktor yang membuat

⁴ Angie Meidyana, 2023, Dignityku kafe Bantu Penyandang Disabilitas Berdikari, <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXQBz-dignityku-kafe-bantu-penyandang-disabilitas-berdikari>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025

penyandang disabilitas harus mengikuti pemberdayaan agar mereka memiliki sebuah *power* dalam melanjutkan rintangan kehidupan

Program *Cooking Class* Dignityku merupakan program dengan kurikulum yang jelas dan terstruktur. penyandang disabilitas akan menjalankan 30 kali pelatihan dengan ujian akhir mereka akan ditempatkan di hotel-hotel yang membutuhkan tenaga mereka. Program tersebut juga memiliki sertifikasi yang dapat digunakan penyandang disabilitas untuk melamar pekerjaan. Program ini bukan sekadar pelatihan keterampilan memasak, melainkan juga merupakan bentuk *community empowerment* untuk menjadikan pribadi mereka menjadi lebih mandiri. Diketahui kafe Dignityku sudah menjalankan program memasak sejak tahun 2022 dengan konsep pengembangan untuk para penyandang disabilitas. Peserta kelas tersebut akan diajarkan bagaimana cara memasak hingga disalurkan untuk magang di beberapa hotel bintang lima di Indonesia, hal ini mendapat perhatian penulis untuk melihat apakah pemberdayaan yang dilakukan dapat mengatasi *disadvantage* yang berarti ketimpangan dan *powerless* yang berarti tidak memiliki kekuatan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan menggunakan teori *empowerment* atau pemberdayaan Jim Ife. Teori *empowerment* mengidentifikasi enam jenis kekuatan penyandang disabilitas yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan. Keenam kekuatan itu diantaranya, satu. kemampuan menentukan pilihan pribadi, dua. kemampuan menentukan kebutuhan sendiri, tiga. kebebasan berekspresi, empat. kemampuan kelembagaan, lima. akses pada sumber daya ekonomi, enam. kebebasan dalam proses reproduksi⁵. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi,

⁵Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 23

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata

Berdasarkan hal tersebut adapun rumusan masalah penelitian untuk meneliti kajian proses pemberdayaan yang digunakan kafe Dignityku dalam membantu kemandirian disabilitas :

1. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan kafe dignityku melalui program *cooking class*?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kafe Dignityku melakukan usaha pemberdayaan?
3. Bagaimana dampak program *cooking class* di kafe Dignityku bagi penyandang disabilitas untuk peluang karir?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan kafe dignityku melalui program *cooking class*
2. Untuk mendeksripsikan faktor yang mendukung dan menghambat kafe Dignityku dalam melakukan pemberdayaan
3. Untuk mendeskripsikan dampak program *cooking class* di kafe dignityku bagi penyandang disabilitas untuk peluang karir

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan melalui pelatihan *cooking class* dengan menekankan aspek keseluruhan dan berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dan praktik pemberdayaan penyandang disabilitas yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kapasitas serta kemandirian penyandang disabilitas.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis, teoretis, dan praktis

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mencapai kesetaraan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi akademisi untuk membantu dalam berpikir kritis serta menambah wawasan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur pendukung perkembangan ilmu sosiologi, khususnya di bidang Kesejahteraan Sosial, Gerakan Sosial, dan Sosiologi Ekonomi

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan memperkaya wawasan keilmuan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis fenomena yang berhubungan dengan proses pemberdayaan disabilitas

1.4.3 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan *cooking class*, khususnya terkait proses pemberdayaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat, disabilitas, dan komunitas

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat dalam menganalisis proses pemberdayaan disabilitas

b. Bagi Disabilitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi disabilitas dalam menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan kualitas diri mereka

c. Bagi Komunitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi komunitas dalam mengenalkan pembelajaran untuk membantu disabilitas mendapatkan *power* dalam kehidupannya.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan penelitian sejenis berupa jurnal yang dapat membantu peneliti dalam proses penelitian. Tinjauan penelitian sejenis ini menggunakan delapan buku, delapan tesis, delapan jurnal nasional dan delapan jurnal internasional yang secara umum membahas isu terkait permasalahan dan strategi bertahan hidup penyandang disabilitas. Literatur yang digunakan dalam tinjauan penelitian sejenis ini dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori, seperti stigma negatif terhadap disabilitas, kebijakan perusahaan dan pemerintah, peran komunitas, pelatihan kerja penyandang disabilitas, advokasi hak dan aksesibilitas, dan proses pemberdayaan penyandang disabilitas.

Berdasarkan topik *pertama* yaitu stigma negatif terhadap disabilitas, Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati menjelaskan penyebutan istilah cacat dinilai mengandung stigma negatif yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas⁶. Stigma negatif akan muncul apabila masyarakat memahami penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak normal atau tidak dibutuhkan, Stigma yang ada di masyarakat terus direproduksi dan menjadi landasan institusi dalam mengambil keputusan, yang kemudian disebut sebagai stigma struktural. Institusi

⁶Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati, 2021, Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), Hlm. 330

sosial, hukum, dan kebijakan bukan hanya untuk menanamkan kepatuhan, tetapi juga mampu mereproduksi dan melegitimasi diskriminasi, stereotip, dan sikap negatif⁷.

Menurut Deborah Carr dan Eun Ha Namkung orang dengan disabilitas baik fisik maupun mental, terlihat maupun tak terlihat bisa dikatakan didiskualifikasi dari penerimaan sosial sepenuhnya, karena orang lain menganggap mereka tidak sepenuhnya mampu menjalankan peran sosial yang diharapkan⁸. Stigma negatif atau pandangan diskriminasi tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang harus didapatkan setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas.

kedua, Permasalahan utama dari penyandang disabilitas adalah kurangnya tempat di masyarakat karena keterbatasan fisik dan mental yang dimilikinya, oleh karena itu dibutuhkan sebuah edukasi dalam mendefinisikan dan memperlakukan penyandang disabilitas agar mereka tidak merasa terasingkan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, maka pemerintah telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorinya. Terdapat ragam disabilitas seperti disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik⁹. pengkategorian tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenali definisi penyandang disabilitas dan menerima mereka seperti manusia pada umumnya agar penyandang disabilitas tetap mempunyai ruang untuk berkembang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap

⁷Yani Fathur Rohman, 2019, Tantangan Bagi Penyandang Disabilitas Penglihatan dalam Mengakses Pekerjaan, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), Hlm. 54.

⁸Deborah Carr dan Eun Ha Namkung, 2021, Physical Disability at Work: How Functional Limitation Affects Perceived Discrimination and Interpersonal Relationships in the Workplace, *Journal of Health and Social Behavior*, 62(4), Hlm. 546.

⁹ Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati, 2021, Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), Hlm. 330.

perlakuan yang bersifat diskriminatif¹⁰. Pemerintah telah mengatur dalam UU nomor 4 tahun 1997 tentang besar kuota tenaga kerja penyandang disabilitas, dimana pada pasal 14 menjelaskan bahwa sebuah perusahaan wajib mempekerjakan satu orang dari seratus karyawan¹¹. Namun seiring waktu kemudian, orang Indonesia terutama yang merupakan aktivis dengan disabilitas mengkritik definisi dalam Undang-Undang no 4/1997 sebagai istilah yang masih lekat dengan stigmatisasi. Pendefinisian tersebut dinilai cenderung berfokus atau menitik beratkan pada kekurangan fisik/physical deficit berupa ketidaknormalan secara medis/medical abnormality, Hal ini dirasa dan dinilai mendiskreditkan dan menstigma para penyandang cacat¹². Pasal 67 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya¹³. Pasal 53 ayat (1) UU No. 8/2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerjanya¹⁴. Pada kenyataannya peraturan tersebut tidak terlaksana secara maksimal karena berbagai faktor seperti, diskriminasi dalam rekrutmen dan penempatan kerja, kesenjangan antara kompetensi penyandang disabilitas dengan persyaratan kerja, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Selain itu, perusahaan juga masih memiliki pemahaman yang minim mengenai cara menyesuaikan lingkungan

¹⁰Abdul Latief Danu Aji, Tiyas Nur Haryani, 2017, Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas, *Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik*, Hlm. 86.

¹¹ *Ibid*, Hlm 87

¹²Dini Widinarsih, 2019, Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), Hlm. 133.

¹³Ismail Shaleh, 2018, Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan di Semarang, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), Hlm. 65.

¹⁴*Ibid*, Hlm. 65

kerja agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas¹⁵. Perusahaan BUMN yang masuk dalam penelitian Susiana & Wardah, 2019 seperti PT Angkasa Pura II, PT PLN, PT Kimia Farma, dan PT BRI Wilayah Aceh, Diketahui bahwa hanya PT BRI yang telah mempekerjakan tiga penyandang disabilitas, sementara tiga perusahaan lainnya belum merekrut tenaga kerja disabilitas sama sekali¹⁶. Hal ini terjadi karena tidak ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhinya.

ketiga, Dalam membantu dan mengawasi hak dan keadilan sosial bagi para penyandang disabilitas, munculah komunitas atau organisasi yang turut membantu pemerintah dalam membentuk sarana dan prasarana yang inklusi. Peran komunitas tersebut biasanya terjadi karena adanya pengalaman pribadi dengan disabilitas¹⁷, kemudian dimulai dengan membuka interaksi dengan para penyandang disabilitas, mengadakan pelatihan, kemudian membantu memberikan edukasi pada masyarakat bahwa sejatinya penyandang disabilitas merupakan individu yang dapat berguna dan dapat bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Rehabilitas berbasis komunitas, dan program motivasi kerja umumnya akan berdampak positif pada peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan sosial penyandang disabilitas¹⁸. Penguatan peran komunitas dalam mendampingi perjuangan penyandang disabilitas dalam memperoleh strategi bertahan hidup sangat membantu adaptasi penyandang disabilitas dalam lingkungan sosial, Soumyendra Kishore Datta & Atanu Sengupta dalam bukunya menjelaskan pendekatan berbasis komunitas yang partisipatif menjadi penting dalam menciptakan strategi penghidupan inklusif dan adaptif terhadap

¹⁵Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati, 2021, Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), Hlm. 326

¹⁶Susiana dan Wardah, 2019, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN, *Jurnal Law Reform*, 15(2) Hlm. 230.

¹⁷Sarah Rule, dkk, 2015, “When I Grow up I Would Like to Be ...”: Factors Affecting Career Choice of Community Disability Workers in Southern Africa, *International Journal of Disability, Development and Education*, 62(5), Hlm. 487

¹⁸Xanthe Hunt, dkk, 2022, Effectiveness of interventions for improving livelihood outcomes for people with disabilities in low- and middle-income countries: A systematic review, *Protocol Journal*, 18(3), Hlm. 3

kebutuhan masyarakat lokal¹⁹. Kemudian Drs, Sunarno MM, menekankan pentingnya dukungan dari keluarga, komunitas, dan tenaga pendidik sebagai faktor eksternal yang memperkuat keyakinan diri peserta dalam menjalani kehidupan yang lebih mandiri²⁰.

Keempat, Dalam membantu penyandang disabilitas bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri tentu diperlukan sebuah pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang perlu diasah, peran komunitas sangat membantu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. Komunitas diyakini dapat mengisi sebuah kekosongan sosial dalam memperjuangkan hak disabilitas, pelatihan dan program persiapan kerja yang dilakukan komunitas terbukti berdampak positif terhadap kesempatan dan keterampilan penyandang disabilitas²¹. Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk memulihkan hak, memperkuat kapasitas, serta meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil utama dari jurnal Arni Surwanti menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia bergantung pada Kementerian Sosial, keterlibatan sektor swasta, dan organisasi disabilitas atau DPO²². Menurutnya program pemberdayaan bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui panti (pelatihan dan rehabilitasi sosial) dan di luar panti (pelatihan keterampilan, modal usaha, advokasi, pendampingan)²³. Di Australia terdapat program inovasi dalam manajemen sumber daya manusia yang dirancang untuk mendukung pekerja dengan disabilitas intelektual atau Workers with an Intellectual Disability atau WWID. Penelitian yang dilakukan oleh Hannah

¹⁹Soumyendra Kishore Datta dan Atanu Sengupta, *Development, Environment and Sustainable Livelihood*, (Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars, 2014), Hlm. 13

²⁰Sunarno, *Efektivitas Pelaksanaan Jambore TIK Penyandang Disabilitas Dalam Meningkatkan Efikasi Diri Untuk Kemandirian Memasuki Dunia Kerja*, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018), Hlm. 63.

²¹Xanthe Hunt, dkk, 2022, Effectiveness of interventions for improving livelihood outcomes for people with disabilities in low- and middle-income countries: A systematic review, *Protocol Journal*, 18(3), Hlm. 27

²²Arni Surwanti, 2014, Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), Hlm. 47

²³Ibid, Hlm 48

Meacham, dkk menunjukan bahwa praktik serial (menggunakan mentor), dan investiture (pemberdayaan melalui dukungan) berperan penting dalam membantu WWID beradaptasi. WWID melaporkan bahwa mereka merasa lebih dihargai, memiliki aspirasi karier yang lebih tinggi, dan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas kerja mereka²⁴. Pemberdayaan bukan hanya sekedar program pelatihan, dibutuhkan proses berkelanjutan transformatif agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi, partisipasi bukan hanya tentang kehadiran secara fisik dalam ruang publik, tetapi tentang keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan akses terhadap layanan di masyarakat.

Kelima, Pemenuhan hak penyandang disabilitas harus terintegrasi dengan baik, misalnya akses terhadap pelatihan juga harus dibarengi dengan akses terhadap transportasi serta penerimaan sosial dari lingkungan. Berbagai pihak telah melakukan advokasi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dengan menerapkan beberapa program, program pemberdayaan saat ini telah dilakukan oleh pemerintah dan swasta, baik itu melalui program *Corporate Social Responsibility* maupun oleh organisasi penyandang disabilitas di daerah, nasional yang didukung oleh organisasi non pemerintah tingkat nasional dan internasional, juga organisasi lain yang bekerja di bidang disabilitas²⁵. Advokasi hak penyandang disabilitas merupakan proses terencana untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan partisipasi politik. Advokasi dilakukan dengan tujuan menghapus hambatan struktural, mengubah stigma sosial, serta mendorong masyarakat agar mematuhi prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Advokasi hak penyandang disabilitas juga akan

²⁴Hannah Meacham, dkk, 2017, Innovation programs at the workplace for workers with an intellectual disability (Two case studies in large Australian organisations), *Emerald Publishing Limited*, 46(7), Hlm. 11

²⁵Arni Surwanti, 2014, Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia, *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), Hlm. 46

membantu mereka dalam menyusun strategi bertahan yang berkelanjutan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, hak terhadap privasi, hak untuk mengakses informasi, hak untuk memiliki rumah dan keluarga, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan²⁶. Di daerah kota Yogyakarta, walaupun belum memiliki peraturan yang secara spesifik melindungi penyandang penyandang disabilitas, tetapi karena komitmen walikotanya, yakni Hery Zudianto yang kuat, beberapa tempat di lingkungan Pemkot sudah berupaya memenuhi aksesibilitas, walaupun masih ada beberapa catatan soal standar aksesibilitasnya²⁷. Selain itu upaya advokasi untuk membuka akses pekerjaan untuk penyandang disabilitas di provinsi Semarang, saat ini terdapat kurang lebih 20 komunitas atau organisasi yang diusung oleh Dinas Sosial Kota Semarang dan dibentuk untuk membentuk komunitas itu sendiri, memfasilitasi jalannya kegiatan yang diselenggarakan komunitas, mewadahi penyandang disabilitas untuk bertukar informasi dan memberikan semangat serta motivasi kepada sesama disabilitas²⁸.

Keenam, Secara umum strategi adalah rencana yang disusun untuk dapat mencapai tujuan. Dalam menyusun proses pemberdayaan, komunitas dignityku mengadakan program *cooking class* untuk membuat penyandang disabilitas menjadi mandiri dan dapat bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sendiri. Kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan untuk menumbuhkan partisipasi dan tanggung jawab penyandang disabilitas terhadap program pemberdayaan yang diterapkan, partisipasi masyarakat menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero merupakan sebuah

²⁶M. Syaff'ie, 2014, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal LSM Sigap Yogyakarta*, 1(2), Hlm. 270

²⁷Ibid, Hlm. 277

²⁸Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati, 2021, Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), Hlm. 333

konsep sentral dan prinsip dasar dari *community development*. peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pencapaian hasil pelaksanaan yang dilakukan masyarakat²⁹. Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan atau *power*. Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok /organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain³⁰.

Program pelatihan *cooking class* yang dijalankan oleh dignityku diharapkan dapat mengembangkan potensi penyandang disabilitas, memperkuat potensi daya melalui pemberdayaan atau *empowering*, dan menciptakan kemandirian. Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan proses pembangunan sumber daya manusia atau penyandang disabilitas itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi, dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dignityku merupakan tindakan yang mulia, karena, program ini tidak hanya membantu penyandang disabilitas untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional³¹.

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero yang dikutip dalam afriansyah, dkk, 2022 definisi pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya

²⁹Agus Triyono, 2014, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Pt. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap, *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 6(2), Hlm. 117

³⁰Ira Rachmawati, dkk, 2024, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Utara, *Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), Hlm. 63

³¹Afriansyah, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023) Hlm. 2

mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya³². Menurut Jim Ife dalam buku Zubaedi, 2013 konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* atau daya dan konsep *disadvantaged* atau ketimpangan. Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post-strukturalis³³.

Jim Ife dalam bukunya yang berjudul *Community Development in an Uncertain World* memberikan pemahaman lebih jauh kepada peneliti tentang pemberdayaan masyarakat yang bisa dibagi menjadi dua prinsip dasar, yaitu perspektif ekologis dan perseptif keadilan sosial. Perspektif ekologis merupakan kerangka teoritis yang melihat pemberdayaan sebagai sebuah aspek menyeluruh yang saling terhubung antara satu dan lainnya. Dalam perspektif ini terdapat lima prinsip yang digunakan sebagai fondasi berpikir, diantaranya adalah : satu. *Holisme* (Keseluruhan), dua. *Sustainability* (Keberlanjutan), tiga. *Diversity* (Keberagaman), empat. *Equilibrium* (Keseimbangan), lima. *Interdependence* (Kebergantungan).³⁴ Selanjutnya, perspektif keadilan sosial yang menggunakan konsep *empowerment* atau pemberdayaan dalam menganalisis pembangunan masyarakat menggunakan dua konsep pokok, yaitu *power* (daya) dan *disadvantage* (ketimpangan)³⁵. Kedua konsep ini memiliki hubungan dalam mewujudkan partisipasi aktif kelompok marginal agar mereka dapat mencapai sebuah kemandirian ekonomi dan sosial.

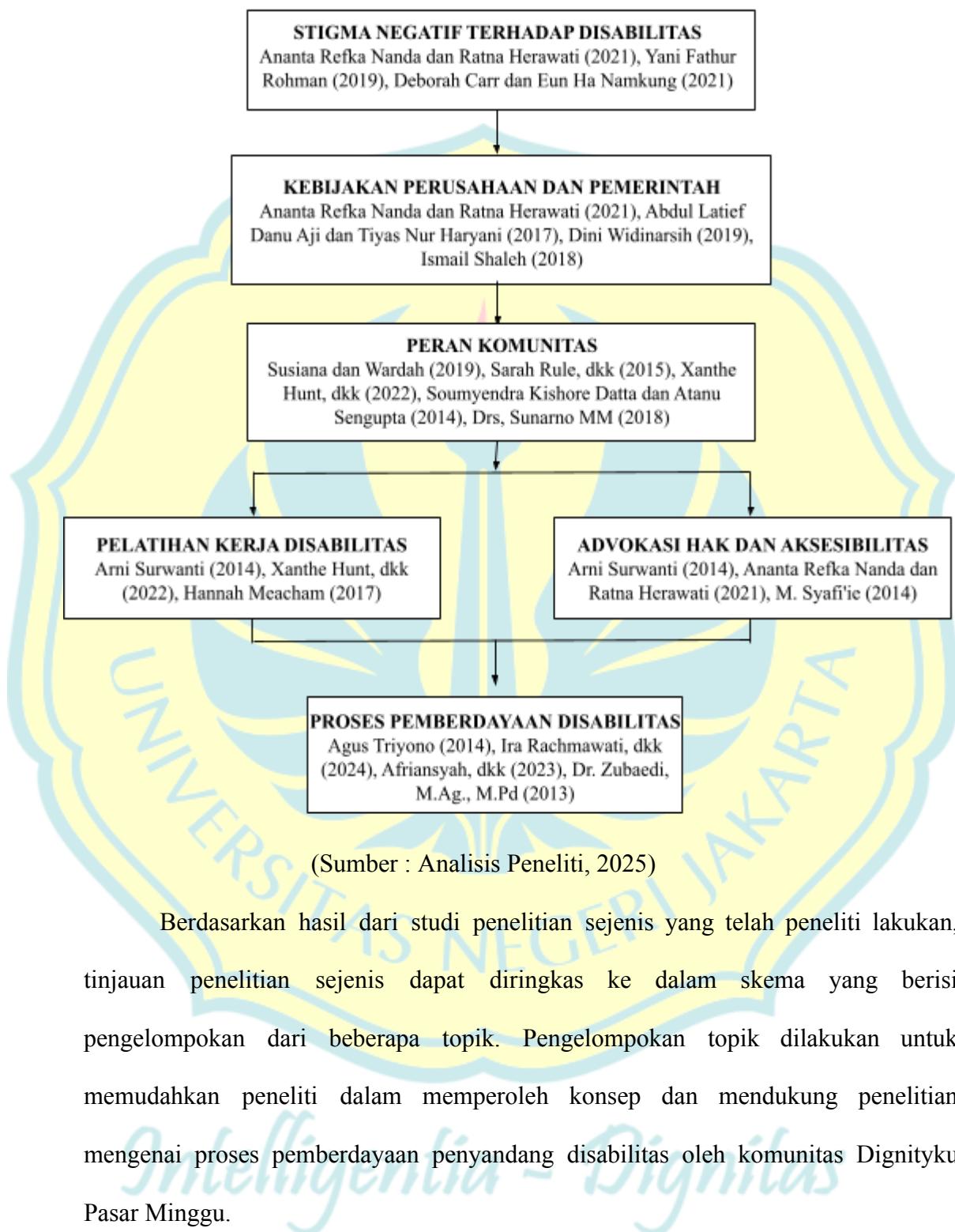
³²Ibid, Hlm 3

³³Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 21.

³⁴ Jim Ife, *Community Development In an Uncertain World : Vision, Analysis, and Practice*, (New York: Cambridge University Press, 2013), Hlm. 53.

³⁵Ibid, Hlm. 65

Skema 1.1 Tinjauan Penelitian Sejenis



Berdasarkan hasil dari studi penelitian sejenis yang telah peneliti lakukan, tinjauan penelitian sejenis dapat diringkas ke dalam skema yang berisi pengelompokan dari beberapa topik. Pengelompokan topik dilakukan untuk

memudahkan peneliti dalam memperoleh konsep dan mendukung penelitian mengenai proses pemberdayaan penyandang disabilitas oleh komunitas Dignityku Pasar Minggu.

Secara garis besar tinjauan penelitian sejenis di atas memiliki relevansi dengan penelitian ini, teori *community development* dalam konsep *empowerment* atau pemberdayaan oleh Jim Ife yang digunakan dalam beberapa literatur dapat digunakan untuk membahas fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, konsep kerentanan juga relevan dengan apa yang dirasakan para penyandang disabilitas karena adanya stigma dan diskriminasi yang beredar di lingkungan sosial. Bentuk bentuk kerentanan yang ada pada literatur diatas dapat memberikan gambaran peneliti untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada pada penyandang disabilitas di kafe dignityku

Peneliti akan memperdalam penelitian pada aspek pemberdayaan melalui peran dan dorongan komunitas penyandang disabilitas. Beberapa penelitian terdahulu cenderung berfokus pada diskriminasi dan kurangnya akses disabilitas kedalam fasilitas ataupun pekerjaan. Sedangkan peneliti akan menjelaskan program pelatihan yang bisa dilakukan agar penyandang disabilitas dapat mandiri menyusun strategi bertahan hidupnya.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai alur pemikiran peneliti dalam memahami proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan *cooking class*. Kerangka ini menempatkan pemberdayaan sebagai upaya pemberian *power* dan pengurangan kondisi *disadvantage* dengan melihat keseluruhan aspek agar pemberdayaan dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kerangka konseptual

ini digunakan sebagai landasan analisis penelitian untuk memahami proses pemberdayaan yang sesuai dengan prinsip *community development*

1.6.1 Kerentanan penyandang disabilitas

Kerentanan disabilitas adalah situasi ketika penyandang disabilitas lebih mudah terkena dampak buruk dari berbagai hal, seperti masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan. Hal ini bukan hanya karena keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mereka miliki, tapi juga karena adanya hambatan dari luar diri mereka. Hambatan itu bisa berupa diskriminasi, sulitnya akses ke fasilitas umum, atau kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Semua hal tersebut membuat penyandang disabilitas sering kali tidak mendapat perlakuan yang setara bahkan beberapa disabilitas mengalami diskriminasi ganda antara kondisi disabilitas dan ras atau gender.³⁶ Penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang tinggi dalam mendapatkan akses terhadap pekerjaan. Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan informasi tentang lowongan kerja. Kondisi ini membuat penyandang disabilitas memiliki peluang kerja yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas.

Mayoritas penyandang disabilitas di dunia berada di negara berkembang dan hidup dalam kemiskinan. Di Indonesia sendiri, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas secara konsisten lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal, banyak disabilitas yang mengalami hambatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungannya karena stigma sosial yang membuat masyarakat dan penyedia kerja ragu untuk menerima penyandang disabilitas

³⁶ Yani Fathur Rohman, 2019, Tantangan Bagi Penyandang Disabilitas Penglihatan dalam Mengakses Pekerjaan, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), Hlm. 60.

sebagai pekerja³⁷. Pemerintah dan penyedia kerja juga sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan serta potensi penyandang disabilitas. Selain itu, program-program pemberdayaan yang sudah ada masih sering memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek, bukan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Sementara dari sisi internal, banyak penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam hal kepercayaan diri, penyesuaian diri, dan keterampilan kerja karena minimnya akses pendidikan dan pelatihan. Bahkan masih banyak yang belum terpapar teknologi informasi dan komunikasi yang sangat penting dalam dunia kerja saat ini.

Upaya pemberdayaan sudah dilakukan oleh berbagai pihak melalui pelatihan kerja dan program penyaluran kerja, baik oleh pemerintah maupun LSM. Contohnya seperti pelatihan di UPT Rehabilitasi Sosial, program yayasan, hingga platform digital seperti Kerjabilitas yang menyediakan informasi lowongan kerja serta pelatihan keterampilan. Namun, sebagian besar program ini masih menggunakan pendekatan penyaluran kerja, yang berarti penyandang disabilitas belum sepenuhnya diberi kebebasan untuk memilih pekerjaan sesuai minat dan kemampuannya. Dengan demikian, kerentanan penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan fisik atau sensorik, tetapi juga oleh sistem sosial yang belum sepenuhnya inklusif. Perlu adanya perbaikan sistem yang berbasis self-determination agar penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dalam menentukan pilihan dan jalur karir mereka.

Penyandang disabilitas, khususnya perempuan dan anak-anak, menghadapi kerentanan yang jauh lebih besar terhadap kekerasan dibandingkan dengan perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki disabilitas. Salah satu faktor utama

³⁷Ro'fah, dan Dyah Ningrum Roosmawati, *Meretas Belenggu Kekerasan: Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Wonogiri*, Sukoharjo, PPRBM Solo, Hlm. 37

yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhadap penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak, adalah tingkat ketergantungan mereka yang tinggi terhadap orang lain. Ketergantungan ini bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik seperti perawatan sehari-hari, tetapi juga mencakup ketergantungan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan pengambilan keputusan. Karena posisi mereka yang sangat bergantung, penyandang disabilitas kerap kali tidak memiliki pilihan atau kekuatan untuk menolak perlakuan buruk yang diterima, bahkan dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi mereka, yaitu keluarga.³⁸

Penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan intensif dari orang lain untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari, seperti mandi, makan, berpindah tempat, atau menggunakan toilet, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Dalam kondisi seperti ini, pelaku kekerasan bisa saja berasal dari orang terdekat seperti anggota keluarga, pengasuh, atau tenaga perawatan. Kekerasan yang dialami pun bisa beragam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, hingga kontrol yang berlebihan atas hidup mereka.

Kerentanan ini semakin diperparah oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki anak penyandang disabilitas tentang kekerasan serta cara membela diri. Dalam banyak kasus, mereka tidak memahami bahwa tindakan yang mereka alami termasuk dalam kategori kekerasan, karena tidak pernah diberikan pemahaman atau pendidikan mengenai hak-hak mereka sebagai individu. Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan mereka, melainkan karena sistem pendidikan dan lingkungan keluarga yang tidak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk belajar tentang perlindungan diri.³⁹

³⁸ Ibid, Hlm. 53

³⁹ M. Syafi'ie, 2014, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal LSM Sigap Yogyakarta*, 1(2), Hlm. 273

Keluarga dan masyarakat seringkali menganggap penyandang disabilitas sebagai sosok yang lemah dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Akibat dari anggapan ini, banyak keluarga yang memilih untuk tidak memberikan informasi atau pendidikan mengenai perlindungan diri kepada mereka. Lebih parah lagi, tindakan yang seolah-olah dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan, seperti mengurung mereka di rumah, melarang berinteraksi dengan dunia luar, atau terlalu membatasi aktivitas mereka, justru semakin membuat penyandang disabilitas tidak mandiri dan sulit mengembangkan kepercayaan diri. Pola-pola overprotektif ini secara tidak langsung melemahkan posisi penyandang disabilitas, menjadikannya semakin pasif dan bergantung, dan pada akhirnya meningkatkan potensi mereka menjadi korban kekerasan tanpa kemampuan untuk melawan.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi negara dan masyarakat untuk mengubah pola pikir dan sistem perlindungan terhadap penyandang disabilitas, pemberian akses yang setara terhadap pendidikan, serta membangun sistem dukungan yang adil dan inklusif adalah langkah penting untuk mengurangi kerentanan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat hidup secara mandiri

1.6.2 Pemberdayaan

Peneliti menggunakan teori *community development* dengan perspektif ekologis dan keadilan sosial yang dicetuskan oleh Jim Ife sebagai teori utama untuk menganalisis penelitian ini. Peneliti akan menggunakan konsep *empowerment* dalam perspektif keadilan sosial untuk memberikan kerangka pemikiran dalam menganalisis daya dan ketimpangan yang dimiliki disabilitas setelah dan sebelum mengikuti proses pemberdayaan⁴⁰. Pengertian pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (*power*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada penyandang

⁴⁰ Jim Ife, *Community Development In an Uncertain World : Vision, Analysis, and Practice*, (New York: Cambridge University Press, 2013), Hlm. 55.

disabilitas. Menurut Jim Ife konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Ketimpangan yang seringkali terjadi di masyarakat biasanya terjadi karena, satu. Perbedaan kelas antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*), ketidaksetaraan gender, dan perbedaan antara kaum minoritas dengan mayoritas, dua. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, keterbatasan fisik, mental dan intelektual, tiga. Ketimpangan personal akibat faktor kehilangan (persoalan pribadi dan keluarga).

Dalam menjelaskan proses pemberdayaan (*empowerment*), Jim Ife mengaitkannya dengan konsep pokok, yaitu daya (*power*). Jim Ife mengidentifikasi enam jenis kekuatan penyandang disabilitas yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan. Keenam kekuatan itu diantaranya, satu. kemampuan menentukan pilihan pribadi (*the ability to make personal choices*), dua. kemampuan menentukan kebutuhan sendiri (*the ability to define one's own needs*), tiga. kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), empat. kemampuan kelembagaan (*institutional capacity*), lima. akses pada sumber daya ekonomi (*access to economic resources*), enam. kebebasan dalam proses reproduksi (*freedom in the process of reproduction/social reproduction*). Keenam sumber kekuatan ini membantu Dignityku dalam menyusun proses pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan

Selanjutnya, Jim Ife dalam bukunya yang berjudul *community development* memberikan perspektif *green* atau ekologi untuk mengkaji pengembangan masyarakat, tujuan dari perspektif ekologis ini adalah untuk menghasilkan perubahan yang adil dan berkelanjutan, Perspektif ini mengajarkan agar proses pemberdayaan tidak hanya fokus pada aspek sosial dan ekonomi, melainkan juga harus ada penekanan dalam tanggung jawab lingkungan sosial, budaya, ekonomi, bahkan

lingkungan fisik secara holistik. Ife menekankan bahwa proses pemberdayaan yang sempit akan menimbulkan sesuatu yang berbahaya, misalnya pemberdayaan yang hanya fokus pada aspek ekonomi akan mengabaikan aspek kemanusiaan, kebudayaan, dan keberlanjutan lingkungan⁴¹.

Perspektif ekologis digunakan peneliti untuk memberikan kerangka analisis mengenai proses pemberdayaan yang berkelanjutan, dalam kerangka pemikiran ini terdapat lima prinsip yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah jenis pemberdayaan dapat sesuai dengan konsep pemberdayaan berkelanjutan⁴². Menurut Jim Ife, kelima prinsip tersebut diantaranya adalah :

1. Prinsip *Holisme*

Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang memandang sebuah peristiwa secara keseluruhan, dimana perubahan yang dihasilkan oleh suatu bagian akan berdampak pada bagian lain. Pandangan ini menjelaskan bahwa segala bentuk pemberdayaan harus melihat dampak pemberdayaan secara keseluruhan, karena dari proses pemberdayaan tersebut bisa menghasilkan efek negatif yang timbul secara bertahap. Dalam pemberdayaan yang efektif, proses pemberian daya harus melibatkan partisipasi peserta pemberdayaan secara aktif agar dampak yang dihasilkan tidak hanya sebatas peningkatan keterampilan, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan kemandirian ekonomi.

2. Prinsip *Sustainability*

Prinsip *sustainability* atau keberlanjutan merupakan prinsip yang mempertahankan jangka panjang didalam sebuah pemberdayaan, menurut prinsip ini pemberdayaan yang baik adalah pemberdayaan yang memiliki jangka panjang atau berkelanjutan. Pemberdayaan yang memiliki sifat sementara atau tidak memiliki

⁴¹ Jim Ife, *Community Development In an Uncertain World : Vision, Analysis, and Practice*, (New York: Cambridge University Press, 2013), Hlm. 53.

⁴² Ibid, Hlm. 53

jenjang yang bisa membantu peserta mengembangkan kemampuan yang mereka miliki seringkali tidak dapat bertahan lama, peserta pemberdayaan belum terbiasa untuk mengelola daya yang mereka dapatkan dari pemberdayaan secara mandiri. Proses keberlanjutan ini dapat membantu peserta pemberdayaan untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka dapatkan dalam lingkungan sosial yang lebih luas.

3. Prinsip *Diversity*

Prinsip *diversity* menempatkan keberagaman sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pembangunan masyarakat, keberagaman merupakan realitas yang tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan manusia karena setiap kelompok atau individu memiliki latar belakang dan ciri khas yang berbeda. Menurut prinsip *diversity* atau keberagaman, keberagaman merupakan bagian dari kehidupan sosial yang normal, keberagaman dipandang sebagai kekuatan yang memungkinkan adanya fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi sehingga tidak mudah rapuh terhadap gangguan. Prinsip ini menjelaskan bahwa dengan keberagaman, suatu kehancuran pada suatu sistem atau organisme bukan berarti kehancuran bagi keseluruhan, oleh karena itu sebuah sistem pemberdayaan harus bisa menerima dan menggunakan keberagaman sebagai upaya untuk lebih kuat dan berkelanjutan. Menghargai keberagaman yang ada di dalam lingkungan sosial sama saja dengan mengakui keterlibatan partisipasi atau pendapat kelompok marginal, misalnya disabilitas.

4. Prinsip *Equilibrium*

Prinsip *equilibrium* atau keseimbangan menekankan relasi hubungan antar sistem sebagai sesuatu yang seimbang, dimana setiap bagian dalam sistem memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi bagian lain. Dalam perspektif ini, berbagai bentuk dualisme seperti laki-laki dan perempuan, yin dan yang, kompetisi dan

kerjasama, global dan lokal, teori dan praktik, pikiran dan tubuh, personal dan politik, fakta dan nilai maupun subjektif dan objektif bukan berarti sesuatu yang harus dipilih, melainkan bagian yang saling terkait dan terintegrasi. Dualisme yang ada tidak dipandang sebagai penekanan dominasi salah satu unsur melainkan sebagai keseimbangan antara kedua unsur yang saling berkaitan.

5. Prinsip *Interdependence*

Prinsip *interdependence* atau saling ketergantungan menitikberatkan proses pemberdayaan dalam sebuah sistem yang saling bergantung dengan sistem yang lain. Prinsip ini menentang anggapan negatif dari sebuah ketergantungan, menurutnya setiap sistem sosial, lembaga, negara, komunitas dan manusia itu sendiri tidak bisa terlepas dari ketergantungan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, begitupun bagi negara, lembaga, dan komunitas. Dari kelima prinsip dalam perspektif ekologis dapat memberikan kerangka pemikiran dalam menganalisis sistem pemberdayaan yang berkelanjutan

1.6.3 Pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Komunitas Dignityku

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yaitu memberdayakan. Memberdayakan penyandang disabilitas adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk bisa melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk memajukan pembangunan yang berkelanjutan, dalam hal ini partisipasi penyandang disabilitas bukan hanya objek bagi pembangunan, tetapi juga menjadi subjek dari pembangunan. Oleh karena itu sudah seharusnya subjek dari pembangunan ialah berdaya (*mempunyai power*) untuk kemandirian diri penyandang disabilitas itu sendiri.

Belakangan ini pemberdayaan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas di Indonesia sedang menunjukkan kemajuan pesat, baik itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Beberapa program dalam upaya pemberdayaan dapat kita temukan dalam aspek pendidikan, saat ini pemerintah sudah menerapkan perluasan akses pendidikan untuk penyandang disabilitas agar mereka bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu menerima akses dan fasilitas sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Di lain sisi pelatihan dan perluasan lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas sedang mengalami kendala dalam pengimplementasiannya, contohnya Perusahaan BUMN yang masuk dalam penelitian yang dilakukan oleh Susiana & Wardah, 2019 seperti PT Angkasa Pura II, PT PLN, PT Kimia Farma, dan PT BRI Wilayah Aceh, Diketahui bahwa hanya PT BRI yang telah mempekerjakan tiga penyandang disabilitas, sementara tiga perusahaan lainnya belum merekrut tenaga kerja disabilitas sama sekali⁴³.

Ketimpangan (*disadvantage*) merupakan penghalang struktural yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mencapai individu yang mandiri, pandangan negatif dan anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa mengerjakan pekerjaan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan Dignityku menyusun proses pemberdayaan. Kurangnya lowongan pekerjaan dan keterbatasan dalam penguasaan keterampilan (*skill*) yang dimiliki oleh penyandang disabilitas juga menjadi faktor penting yang menghalangi kelompok penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja yang setara, oleh karena itu pemberdayaan yang dilakukan oleh kafe Dignityku melalui program *cooking class* merupakan bentuk dari *transfer power* agar penyandang disabilitas mempunyai *power* untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri.

⁴³Susiana dan Wardah, 2019, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN, *Jurnal Law Reform*, 15(2), Hlm 230.

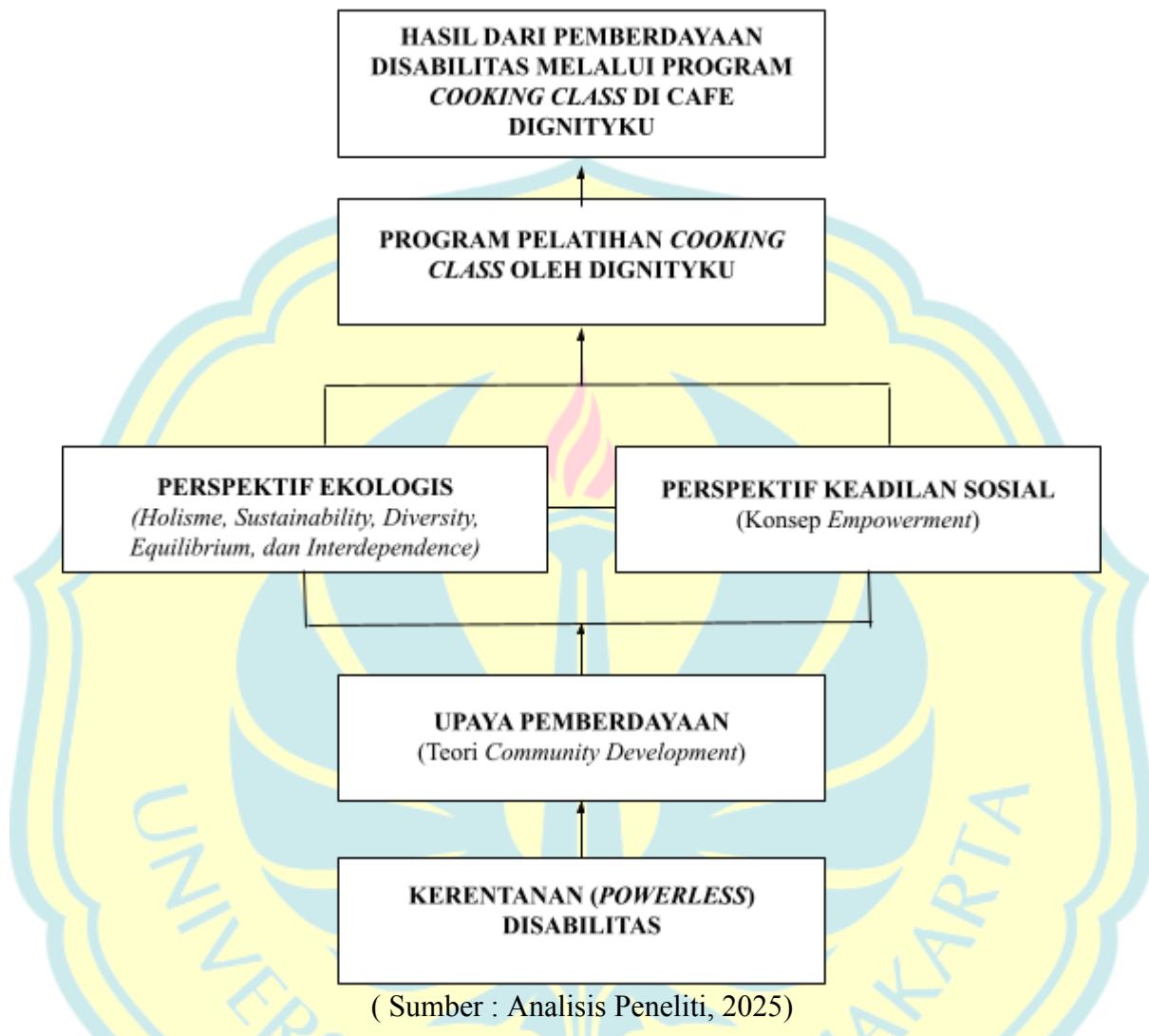
Dengan dukungan pelatihan, fasilitas inklusif, kesempatan magang dan kerja yang difasilitasi oleh Dignityku, penyandang disabilitas tidak hanya diberikan peluang tetapi juga dilengkapi dengan kompetensi yang memungkinkan mereka memperkuat posisi mereka dalam dunia kerja. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa pemberdayaan berupaya mengubah kondisi dimana kelompok yang mengalami ketimpangan struktural dapat memperoleh kekuatan (daya) untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dignityku akan melewati beberapa proses tahapan, mulai dari penentuan kemampuan (*power*) yang dimiliki penyandang disabilitas hingga proses pelatihan agar program ini dapat menjadi wadah pembentuk kesetaraan bagi penyandang disabilitas tanpa melihat kekurangan (*powerless*) dari diri mereka.

1.6.4 Hubungan Antar Konsep

Hubungan antar konsep dalam skema penelitian ini adalah gambaran dari kerangka konseptual dengan teori yang dijadikan dasar analisis penelitian. Konsep Keberlanjutan yang ada pada prinsip dari persepektif ekologis membantu peneliti memahami bagaimana program pemberdayaan berjalan secara berkelanjutan dan bagaimana program dilihat secara keseluruhan. Perspektif ini menekankan prinsip pemberdayaan pada, satu. *Holisme*, dua. *Sustainability*, tiga. *Diversity*, empat. *equilibrium*, lima. *interdependence*. Kerentanan (*powerless*) yang dialami penyandang disabilitas adalah wujud dari adanya ketimpangan (*disadvantage*) yang berkembang di masyarakat, salah satu teori yang relevan dalam menggambarkan fenomena ini adalah teori pemberdayaan (*empowerment*) yang di cetuskan oleh Jim Ife.

Skema 1.2 Kerangka Konseptual



Teori *community development* akan menunjukkan bagaimana pemberdayaan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas di kafe Dignityku menjadi tempat atau wadah mereka dalam mewujudkan kesetaraan. Pemanfaatan *power* yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat digunakan sebagai bahan pemberdayaan itu sendiri, dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pemberdayaan akan membuat program *cooking class* dapat mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini, pemanfaatan daya (*power*) yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, seperti kemampuan memasak, semangat kerja, dan keinginan untuk berkontribusi dapat dijadikan bahan pendukung utama dari pemberdayaan.

Melalui pelatihan, kelas memasak, dan kesempatan magang di beberapa hotel, penyandang disabilitas memiliki akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang memungkinkan mereka mengubah posisi mereka dari pihak yang lemah menjadi pihak yang berdaya.

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian digunakan untuk memberikan pemahaman kepada peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berkaitan dengan proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan *cooking class*. Dengan adanya metode penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang relevan dan dapat fokus pada tujuan penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program *Cooking Class*” Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami⁴⁴. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus merupakan kombinasi yang sangat efektif, metode ini mempelajari fenomena secara mendalam dalam masyarakat, tentang latar belakang, keadaan, dan hubungan atau interaksi yang terjadi dalam masyarakat⁴⁵. Dengan menggunakan berbagai jenis sumber data seperti observasi, wawancara, hingga dokumentasi, metode ini dapat membantu peneliti untuk mengeksplorasi melalui berbagai sudut pandang untuk memahami secara mendalam pengalaman hidup, pandangan, serta strategi yang dijalani oleh subjek penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan penelitian untuk memahami secara mendalam bagaimana Dignityku menjalankan proses

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 30.

⁴⁵ Ibid, Hlm 18

pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk motivasi, pengalaman, dan persepsi para peserta penyandang disabilitas dalam kelas memasak. Sedangkan dengan menggunakan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci kondisi atau situasi yang dialami oleh subjek atau informan yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian ini difokuskan pada proses pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Kafe Dignityku.

Peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian, menggali narasi mereka, serta mencoba memahami perspektif yang mereka miliki. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menelaah secara intensif dan fokus pada peristiwa, proses, dan konteks yang terjadi di kafe Dignityku, khususnya terkait dengan peran Dignityku dalam menyusun proses pemberdayaan dan membangun kemandirian bagi para penyandang disabilitas. Pendekatan ini dipandang paling relevan untuk mengungkap realitas sosial yang kompleks dan tidak bisa direduksi ke dalam angka-angka statistik semata.

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang memiliki hubungan keterikatan langsung dengan objek penelitian, subjek dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan keberlangsungan program pemberdayaan penyandang disabilitas di kafe Dignityku. Mereka meliputi *owner* kafe Dignityku sebagai penggagas utama yang memiliki visi dalam menciptakan ruang kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, penanggung jawab program yang bertugas mengelola dan menjalankan kegiatan pelatihan seperti *cooking class*, serta karyawan dan peserta pelatihan yang merupakan penyandang disabilitas dengan latar belakang beragam. Keempat kelompok ini dipilih karena masing-masing memiliki peran

penting dalam proses pemberdayaan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, hingga penerima manfaat secara langsung.

Penelitian ini melibatkan tiga karyawan Dignityku, empat peserta pelatihan memasak, dan dua kostumer Dignityku sebagai responden, ketiga karyawan Dignityku dan keempat peserta penyandang disabilitas merupakan informan kunci dari penelitian yang peneliti lakukan. Informan kunci dipilih karena ketiga karyawan Dignityku dan keempat peserta penyandang disabilitas memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan secara langsung mengenai pemberdayaan melalui *cooking class* kepada penyandang disabilitas di kafe Dignityku. Kemudian dua kostumer Dignityku dipilih untuk menjadi informan triangulasi karena mereka merupakan peserta yang menerima manfaat langsung dari adanya pemberdayaan yang dilakukan. Setelah mengumpulkan data dari beberapa informan yang memiliki sudut pandang serta pengalaman yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kafe Dignityku kepada peserta penyandang disabilitas untuk mencapai individu yang lebih mandiri. Melalui sudut pandang dan pengalaman dari subjek-subjek ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana proses pemberdayaan dijalankan dan dirasakan dalam praktik sehari-hari.

Tabel 1.1 Data Informan Kunci

No	Nama	Usia	Status
1.	Sarrah Yaniar	36	Assistant to CEO
2.	Rio	35	Supervisor
3.	Jeane	44	Head Staff
4.	Bondan Ramadhan	26 Tahun	Peserta
5.	Nadia Azzahra	27 Tahun	Penyandang

No	Nama	Usia	Status
6.	Asti Yunia	20 Tahun	Disabilitas
7.	Adella Zahwa	20 Tahun	

(Sumber: Analisis Peneliti, 2025)

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kafe Dignityku yang beralamat di Jl. Sepat No.22, RT.7/RW.2, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat berlangsungnya program pemberdayaan penyandang disabilitas yang menjadi fokus utama penelitian. Penelitian dilakukan dengan turun langsung ke lokasi untuk melakukan observasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program.

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Juli 2025. Pada bulan ini peneliti mulai melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari asisten pemilik kafe, penanggung jawab program, karyawan, serta peserta pelatihan. Kegiatan pengumpulan data akan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan informan dan dinamika aktivitas di kafe Dignityku.

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan. Peneliti hadir secara aktif untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aktivitas pemberdayaan yang berlangsung di kafe Dignityku, serta membangun interaksi dengan subjek penelitian untuk menggali informasi yang mendalam untuk keperluan data peneliti.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menentukan metode yang akan menjadi acuan dalam mengumpulkan data atau informasi dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁶ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan melalui pengumpulan dari subjek atau informan penelitian. Dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, atau diskusi kelompok, peneliti mendapatkan informasi original yang spesifik terkait fenomena pemberdayaan. Responden dalam penelitian ini adalah anggota Dignityku yang memiliki interaksi langsung dengan proses pemberdayaan penyandang disabilitas, peneliti ingin mengetahui perspektif dan motivasi Dignityku dalam menyusun proses pemberdayaan untuk penyandang disabilitas. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti, data sekunder merujuk pada data yang sudah ada sebelumnya, misalnya dokumen, laporan, arsip, dan publikasi media sosial. Data sekunder yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah buku, publikasi media sosial, dokumen dan hasil penelitian atau sumber yang relevan ataupun terkait dengan penelitian ini. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penelitian dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap: data primer memberi akses langsung ke pengalaman informan, sementara data sekunder memberi landasan kontekstual dan memungkinkan triangulasi agar temuan menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁶ Feny Rita Piantika, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), Hlm. 50.

1 Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yakni di kafe Dignityku, untuk melihat aktivitas sehari-hari para karyawan dan peserta program pelatihan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami situasi sosial, interaksi antar individu, serta dinamika yang terjadi dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas.⁴⁷ Peneliti akan melakukan observasi secara mendalam kepada 3 anggota Dignityku sebagai subjek utama dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi secara langsung dan online melalui kanal *live* media sosial Dignityku untuk mengetahui kondisi atau keadaan langsung situasi pemberdayaan yang dilakukan.

Pengamatan secara langsung di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Melalui observasi, peneliti memiliki kesempatan untuk mengamati secara nyata situasi, interaksi, perilaku, serta konteks lingkungan yang relevan dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas di Dignityku. Dengan demikian, peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan kaya tentang bagaimana proses pemberdayaan itu dijalankan, bagaimana instruktur berinteraksi dengan peserta penyandang disabilitas, bagaimana peserta menjalani pelatihan dan praktik di dapur, bagaimana suasana operasional kafe, serta bagaimana dinamika sosial di antara para penyandang disabilitas, staf dan pelanggan berjalan.

Observasi ini membantu memperkaya interpretasi dan wawasan mengenai proses pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dignityku, karena peneliti tidak hanya mendengarkan atau membaca laporan, tetapi benar-benar melihat proses yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui pengamatan

⁴⁷ Ibid, Hlm. 57

langsung menjadi fondasi penting untuk analisis yang lebih mendalam dan valid, serta mendukung pemahaman yang lebih kontekstual terhadap keberhasilan ataupun tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, yaitu asisten pemilik kafe, penanggung jawab program, karyawan penyandang disabilitas, dan empat peserta pelatihan. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap terbuka terhadap pengembangan percakapan sesuai dengan arah pembahasan yang berkembang di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman pribadi, pandangan, serta makna yang dirasakan para informan terkait proses penerimaan daya dan proses pemberdayaan yang dilakukan.⁴⁸

Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, metode ini dirancang untuk memperoleh informasi secara rinci dan mendalam yang dilakukan secara langsung dari para narasumber atau subjek penelitian, informasi yang didapatkan mencakup pengalaman pribadi, motivasi, pandangan, serta dinamika yang mereka alami. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti tidak hanya menanyakan fakta atau data permukaan, tetapi membuka ruang dialog yang memungkinkan narasumber berbicara secara terbuka tentang hal-hal yang terkadang sulit diungkap melalui instrumen yang lebih terstruktur seperti kuesioner.

Dalam konteks penelitian ini, wawancara mendalam sangat berperan penting karena melibatkan subjek-subjek seperti anggota Dignityku, peserta pelatihan, dan pelanggan di lingkungan Dignityku. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali

⁴⁸ Ibid, Hlm. 51

secara kaya dan kontekstual bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas diorganisir, bagaimana pengalaman penyandang disabilitas dalam pelatihan dan operasionalisasi program, serta bagaimana pelanggan dan pemangku kepentingan memandang dan merespon kegiatan pemberdayaan tersebut.

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti visual dan tertulis yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberdayaan di kafe Dignityku. Bentuk dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto-foto aktivitas pelatihan, brosur atau pamflet program, sertifikat pelatihan, serta materi publikasi dari pihak kafe atau media massa. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi, serta memberikan gambaran konkret mengenai situasi dan kondisi yang diteliti.⁴⁹

Melalui dokumentasi, peneliti dapat menelusuri jejak perkembangan program pemberdayaan, bagaimana pelatihan dilakukan, bagaimana fasilitas disiapkan, bagaimana interaksi antarpihak berlangsung, serta bagaimana hasil pelatihan penyandang disabilitas muncul dalam bentuk sertifikasi atau publikasi. Misalnya, foto-foto aktivitas menunjukkan peserta sedang bekerja di dapur, brosur yang memuat visi-misi dan struktur pelatihan, sertifikat mendanak kelulusan peserta, dan artikel media mengungkap respons publik terhadap program. Dokumentasi tersebut juga memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data, yakni memverifikasi temuan dari wawancara dan observasi dengan bukti visual dan tertulis sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih kuat.

Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai bukti penting dalam penelitian ini yang berfungsi melalui dua cara.

⁴⁹ Ibid, Hlm. 60

Pertama, dokumentasi memperkaya narasi penelitian dengan bukti yang terlihat, sehingga meminimalkan kesimpulan peneliti yang hanya sesuai dengan pendapat peneliti. Kedua, dokumentasi menyediakan konteks historis, institusional, dan operasional yang memperjelas bagaimana program Dignityku berjalan dan bagaimana peserta penyandang disabilitas dalam proses pemberdayaan. Dengan penggabungan dokumentasi, wawancara, dan observasi, penelitian ini menjadi lebih kredibel, dan mampu menghadirkan gambaran yang mendalam tentang proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kafe Dignityku.

Sementara itu, studi kepustakaan digunakan sebagai salah satu sumber data penting dalam penelitian untuk membangun landasan teori dan memperkaya pemahaman peneliti terhadap berbagai isu yang relevan dengan disabilitas, pemberdayaan, proses pemberdayaan, dan peran komunitas dalam proses pemberdayaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, undang-undang, laporan lembaga, hingga berita daring yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan, peneliti dapat memperluas wawasan serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya. Kajian pustaka juga membantu peneliti mengidentifikasi kekurangan, kesenjangan, atau celah yang terdapat pada penelitian terdahulu, sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan secara lebih spesifik, signifikan, dan relevan dengan konteks yang diteliti.

Data dari studi kepustakaan ini tidak hanya digunakan dalam tinjauan pustaka, tetapi juga sebagai pembanding dan pelengkap dalam menganalisis temuan di lapangan. studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperkuat validitas argumen penelitian dengan cara membandingkan serta memverifikasi hasil observasi dan wawancara menggunakan teori dan pengetahuan yang telah disajikan dalam

literatur yang relevan. Dengan demikian, kajian pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pendukung tinjauan teori, tetapi juga menjadi alat reflektif yang membantu peneliti menafsirkan data lapangan secara lebih objektif dan komprehensif. Melalui langkah ini, penelitian tentang proses pemberdayaan penyandang disabilitas di kafe Dignityku dapat ditempatkan dalam kerangka konseptual yang kuat serta memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan pengetahuan mengenai praktik pemberdayaan dan inklusi sosial di Indonesia.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Setelah semua data dan informasi terkumpul dari para subjek atau informan dengan menggunakan teknik-teknik sebelumnya, peneliti kemudian memasuki tahap analisis yang dikenal sebagai reduksi data. Reduksi data merupakan proses kritis dalam penelitian kualitatif yang meliputi penggolongan, penyaringan, penajaman, pengarahan, dan pengorganisasian data atau informasi agar menjadi lebih fokus dan bermakna. Dalam praktiknya, proses ini dilakukan dengan memilih bagian data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, memfokuskan pada tema atau kategori yang relevan, dan mengesampingkan informasi yang dianggap kurang mendukung atau tidak relevan.⁵⁰

Setelah seluruh data dan informasi terkumpul dari subjek atau informan melalui berbagai teknik yang telah dijelaskan sebelumnya (wawancara, observasi, dokumentasi), peneliti kemudian menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat mengidentifikasi hasil informasi tersebut dan menemukan pola maupun makna yang muncul dari praktik pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dignityku. Analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan,

⁵⁰ Ibid, Hlm. 88

menggambarkan, dan menginterpretasikan fenomena yang sedang diteliti secara faktual, akurat, dan sistematis.

Melalui teknik ini, peneliti bukan sekadar menyajikan data apa adanya, tetapi juga mengolah data tersebut menjadi rangkaian narasi yang menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan berjalan, apa saja strategi yang diterapkan, dan mengapa strategi tersebut berhasil atau malah menghadapi hambatan. Misalnya, data wawancara tentang pengalaman peserta pelatihan akan dijabarkan menjadi tema-tema seperti motivasi, akses fasilitas, dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Hasil observasi operasional kafe akan digambarkan untuk menunjukkan interaksi antar pihak, seperti dokumentasi berupa foto dan sertifikat akan disusun secara naratif untuk memperjelas hasil dari program pemberdayaan. Dengan demikian, analisis deskriptif membantu merangkum data yang sangat kaya dan kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan relevan terhadap tujuan penelitian.

Dalam teknik analisis deskriptif ini, peneliti dapat menjelaskan secara rinci mengenai proses pemberdayaan melalui ketiga anggota Dignityku sebagai subjek utama penelitian, hal ini termasuk sociohistoris pembentukan Dignityku, tahun pelaksanaan, dan faktor pendukung yang mempengaruhi berjalannya proses pemberdayaan. Pada penelitian ini, informasi dan data-data diperoleh melalui berbagai metode, misalnya wawancara mendalam secara langsung dengan anggota dan pengelola Dignityku yang berperan aktif dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas, observasi partisipatif di lokasi kegiatan yaitu kafe Dignityku Pasar Minggu, serta dokumentasi terhadap arsip, laporan kegiatan, dan publikasi yang berkaitan dengan program pemberdayaan. Pendekatan multi metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika yang terjadi

dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kelas memasak.

Teknik analisis deskriptif dalam konteks penelitian ini berperan penting dalam menyusun, mengelompokkan, serta menginterpretasikan seluruh data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan informasi yang logis, dan mudah dipahami. Melalui penerapan analisis deskriptif, peneliti dapat menghubungkan berbagai temuan lapangan untuk menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan berjalan di lingkungan Dignityku, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai oleh para peserta penyandang disabilitas.⁵¹

Selain itu, teknik ini juga membantu peneliti memahami faktor-faktor pendukung seperti peran pendamping, dukungan lembaga, serta kerja sama komunitas dalam memperkuat kemandirian peserta. Pendekatan analisis deskriptif memungkinkan hasil penelitian tidak hanya menggambarkan aktivitas pelatihan memasak secara faktual, tetapi juga menyoroti proses pemberdayaan yang diterapkan Dignityku sebagai bentuk nyata dari inklusi sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi penyandang disabilitas di tengah tantangan dunia kerja yang kompetitif.

Teori *community development* Jim Ife menjadi acuan dalam memiliki peran penting dalam penerapan teknik analisis deskriptif bagi penelitian proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kelas memasak Dignityku, Teori *community development* ini dapat membantu peneliti untuk memahami faktor apa saja yang dapat dikembangkan oleh penyandang disabilitas agar dapat diberdayakan, bagaimana cara Dignityku mengambil langkah untuk menyusun tahapan pemberdayaan agar konsep pemberdayaan melalui kelas memasak ini dapat berjalan dengan baik.

⁵¹ Ibid, Hlm 85

Pada konteks penelitian ini, penerapan teori *community development* juga akan membantu peneliti dalam menjelaskan ketimpangan dan kekuatan atau daya yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat menjadi sebuah aspek penting yang diperlukan untuk menyusun proses pemberdayaan, teori proses pemberdayaan Jim Ife membantu peneliti menjelaskan bagaimana penyandang disabilitas yang sebelumnya menghadapi hambatan struktural, seperti terbatasnya akses pelatihan, stigma masyarakat, dan peluang kerja yang rendah dapat mulai memperoleh kekuatan melalui proses pelatihan, praktik, serta kesempatan kerja.

Dengan demikian, analisis deskriptif yang didukung teori Ife memungkinkan peneliti untuk menggambarkan bagaimana ketimpangan yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi titik awal pengembangan, dan bagaimana kekuatan atau kapasitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, seperti motivasi yang tinggi, keterampilan memasak, dan dukungan sosial menjadi aspek penting yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan.

Selain itu, teori ini juga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan bagaimana program yang dijalankan merupakan sesuatu yang memiliki kebermanfaatan dan keberlanjutan, bukan sekedar program yang tidak memiliki arah dan tujuan atau hanya sekedar formalitas saja. Dengan memakai kerangka teori Jim Ife, peneliti dapat lebih sistematis memahami faktor apa saja yang dapat dikembangkan oleh penyandang disabilitas agar mereka benar-benar diberdayakan, serta bagaimana Dignityku mengambil langkah strategis untuk menyusun dan menjalankan program kelas memasak, seperti pengadaan fasilitas, pelatihan teknis yang terstruktur, hingga kesempatan magang merupakan bagian dari tahapan yang diarahkan untuk mengubah kondisi, memperkuat kapasitas, dan hasilnya akan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja secara layak.

Dengan begitu, penggunaan teori Jim Ife akan memperkuat kerangka analisis penelitian, sehingga peneliti tidak hanya menjelaskan proses yang terjadi, tetapi juga menyampaikan bagaimana program tersebut menyasar akar ketimpangan sekaligus mengaktifkan potensi kekuatan (daya) bagi penyandang disabilitas sehingga program pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

1.7.7 Triangulasi Data

Teknik triangulasi data merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk menjamin keakuratan dan kredibilitas data yang diperoleh. Data akan diperiksa melalui berbagai perspektif serta sumber yang berbeda, dengan tujuan untuk meminimalisir bias yang mungkin muncul selama proses pengumpulan maupun analisis data.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi data dengan cara mereferensikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari beragam sumber, yaitu dua kostumer di kafe Dignityku. Melalui wawancara dengan dua konsumen memberikan perspektif eksternal tentang bagaimana mereka menilai layanan penyandang disabilitas, interaksi dengan staf penyandang disabilitas, dan bagaimana persepsi mereka terhadap program pemberdayaan tersebut.

Data dari kostumer kemudian diverifikasi dan dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan misalnya pengamatan langsung terhadap proses pelatihan, interaksi peserta dengan pengajar, suasana kafe serta dokumentasi visual dan tertulis seperti foto kegiatan, sertifikat, dan materi. Dengan menggabungkan pandangan dari anggota Dignityku dan peserta pelatihan sebagai subjek utama, serta konsumen sebagai bagian dari triangulasi data, peneliti dapat meninjau kesesuaian antara apa yang diceritakan konsumen dengan fakta yang terjadi di lapangan.

⁵² Ibid, Hlm. 14

Dengan demikian, penerapan teknik triangulasi data dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat validitas temuan, tetapi juga memungkinkan peneliti menyajikan pandangan yang lebih menyeluruh, tentang bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui DignityKu dijalankan dan dirasakan dari berbagai sudut pandang, mulai dari anggota DignityKu yang menyusun dan menjalankan program sebagai subjek utama, peserta pelatihan penyandang disabilitas, konsumen, serta hasil observasi langsung di lapangan.

Tabel 1.2 Data Informan Triangulasi

No	Nama	Usia	Status
1.	Putri	31 Tahun	Kostumer Dignityku
2.	Opi	23 Tahun	

(Sumber: Analisis Peneliti, 2025)

1.7.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berfungsi untuk menjelaskan alur berpikir yang digunakan dalam menyusun keseluruhan isi penelitian. Tujuan dari penyusunan sistematika ini adalah agar peneliti dan pembaca dapat dengan mudah memahami isi, arah, serta tujuan dari penelitian secara menyeluruh dan runtut. Penelitian ini disusun ke dalam lima bab utama, yaitu:

Bab 1 Bab ini akan menjelaskan latar belakang penelitian dengan tujuan agar peneliti dapat memfokuskan diri pada fenomena atau topik yang dikaji, yaitu proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program kelas memasak di Dignityku. Selanjutnya, peneliti juga akan menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sejenis, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Semua komponen tersebut disusun agar peneliti dapat memperjelas kerangka konseptual sebagai dasar dari penulisan penelitian. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini diarahkan untuk

memberikan penjelasan menyeluruh mengenai latar belakang Dignityku, proses pemberdayaan yang diterapkan, dan dampak dari strategi tersebut terhadap para peserta penyandang disabilitas dan lingkungan sekitar Dignityku.

Bab 2 Pada bab ini, peneliti akan memaparkan gambaran umum Dignityku dan konsep operasionalnya sebagai wadah pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kelas memasak, peneliti akan membagi bab ini menjadi empat sub bab besar. Sub-bab pertama akan berfokus pada pengantar. Sub-bab kedua akan berfokus pada sejarah keberadaan Dignityku. Kemudian, di sub-bab ketiga akan berfokus pada struktur kepengurusan Dignityku. Selanjutnya, sub-bab keempat peneliti akan berfokus pada pelatihan *cooking class* sebagai program utama komunitas Dignityku. Terakhir, sub-bab kelima akan fokus pada penutup.

Bab 3 Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai berbagai proses pemberdayaan yang telah diterapkan oleh Dignityku dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui program kelas memasak, pembahasan akan dibagi ke dalam lima sub-bab besar. Sub-bab pertama akan berfokus pada pengantar. Sub-bab kedua akan berfokus pada proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dignityku mulai dari awal perekrutan peserta hingga tahap magang. Kemudian, sub-bab ketiga akan berfokus pada faktor yang mendukung dan menghambat berjalannya program pemberdayaan. Selanjutnya, sub-bab keempat akan membahas dampak yang dirasakan peserta penyandang disabilitas setelah mengikuti program pemberdayaan. Terakhir, sub-bab kelima akan fokus pada penutup.

Bab 4 Pada bab ini, peneliti akan menganalisis proses pemberdayaan Dignityku melalui *cooking class* dalam mempersiapkan kemandirian penyandang disabilitas, pada bab ini akan dibagi menjadi lima sub-bab. Sub-bab pertama akan fokus pada pengantar, sub-bab kedua akan fokus membahas perspektif ekologis dalam

pemberdayaan Dignityku, pada sub-bab ini akan membahas lima prinsip ekologis, yaitu *holisme*, *sustainability*, *diversity*, *equilibrium*, dan *interdependence*. Kemudian pada sub-bab ketiga akan membahas perspektif keadilan sosial, pada sub-bab ini akan membahas konsep pemberdayaan yang berisikan dua konsep dasar, yaitu daya dan ketimpangan. Selanjutnya, pada sub-bab keempat akan fokus membahas refleksi pendidikan. Terakhir, sub-bab kelima akan fokus pada penutup

Bab 5 berisi Penutup, yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait, baik bagi komunitas, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya.



Intelligentia - Dignitas